

Desa Hilang, Kota Terbilang

Rhiza S. Sadjad

Mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi Universitas Terbuka

Salah satu fenomena global yang tak terhindari adalah terjadinya aglomerasi dari kota-kota besar yang bergabung dengan kota-kota lebih kecil di sekelilingnya menjadi kota sangat super besar - disebut kota megalopolitan - yang populasinya belasan bahkan puluhan juta orang. Konsekuensinya, wilayah pedesaan yang semula berada di sekeliling dan di antara kota-kota itu hilang, melebur menjadi bagian dari kota megalopolitan. Pada tahun 1950an, di dunia hanya dikenal ada 2 (dua) kota megalopolitan, yaitu kota NewYork di Amerika Serikat dan kota London di Inggris. Pada akhir abad ke-20, diperkirakan sudah lebih dari 30 kota di dunia yang memenuhi kriteria sebagai kota megalopolitan. Salah satu di antaranya adalah Jakarta yang sedang dalam proses pelepasan status *de facto* sebagai Daerah Khusus Ibukota negara. Kota megalopolitan Jakarta meng-aglomerasi kota-kota di sekelilingnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (dinamakan wilayah Jabodetabek), mungkin masih akan ditambah dengan sebagian wilayah Karawang dan Sukabumi.

Kota Bogor khususnya, terhubung dengan Jakarta dan kota-kota lainnya melalui jalur rel kereta-api, jalan tol, beberapa jalan raya antar-kota dan beberapa sungai besar, di antaranya sungai Cisadane dan sungai Ciliwung, yang semua pada awalnya dahulu melintasi wilayah pedesaan di Kabupaten Bogor. Pada saat ini, hampir seluruh wilayah pedesaan di sekitar jalur rel, jalan dan sungai itu telah punah, menjelma menjadi wilayah perkotaan. Sebagai contoh misalnya di jalur jalan raya Dramaga yang mengarah ke barat dari kota Bogor, menuju Leuwiliang-Jasinga. Pada tahun 1950an, sepanjang kurang lebih 8 km, mulai dari Sindangbarang Loji sampai Babakan Dramaga, masih merupakan wilayah pedesaan yang berbasis pertanian sawah dan perkebunan karet. Kedua basis kehidupan wilayah pedesaan ini sekarang sudah tamat riwayatnya.

Pada akhir tahun 1950an perkebunan-perkebunan karet di berbagai wilayah Jawa Barat dan Banten di-nasionalisasi-kan karena pemilik-pemiliknya yang berkebangsaan Belanda tidak bersedia menjadi warga-negara Indonesia, lalu pulang ke negaranya. Khusus lokasi perkebunan dan pabrik karet Dramaga, diserahkan oleh pemerintah Presiden Soekarno kepada Kementerian PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) untuk di-konversi menjadi kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) – sekarang *IPB University* - yang waktu itu masih menjadi bagian dari Universitas Indonesia (UI). Sejak “*cangkul pertama*” oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963, dibangunlah kampus IPB lengkap dengan segala fasilitasnya yang secara bertahap menghabisi seluruh eks-lahan perkebunan karet di Dramaga.

Sementara itu, perkebunan-perkebunan karet di wilayah Jawa Barat dan Banten lainnya pun telah di-konversi menjadi berbagai wilayah perkotaan. Karena tidak ada lagi pemasok bahan mentah berupa getah karet, maka pabrik karet Dramaga pun di-likuidasi. Pabrik Ban “*Good Year*” di Bogor pada masa itu sudah mem-produksi ban yang dibuat dari karet sintetik, sehingga tidak lagi memerlukan bahan baku karet alam seperti yang di-produksi pabrik karet di Dramaga. Lengkap sudah, keseluruhan ekosistem per-karet-an dari hulu sampai di hilir pun tamat riwayatnya di sekitar jalan raya Dramaga, bahkan di seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten.

Awalnya masih ada areal persawahan untuk mempertahankan masyarakat pedesaan di wilayah sekitar jalan raya Dramaga. Usaha tani yang beratus tahun sudah menjadi sumber nafkah bagi beberapa generasi petani pemilik dan penggarap secara turun-temurun pun mulai meredup. Sebenarnya sawah-sawah di sekitar jalan raya Dramaga adalah lahan-lahan subur dengan sistem irigasi yang baik, menghasilkan beras ber-kualitas. Tapi satu-dua generasi terakhir ini, tidak ada lagi yang melanjutkan usaha tani yang diwariskan oleh nenek-moyang mereka. Sebagian besar dari mereka mencari nafkah dari pekerjaan non-pertanian yang diperoleh di kota, atau bahkan di luar-negeri. Selain itu, pertumbuhan penduduk di wilayah seluruh Jabodetabek meningkat pesat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Pertumbuhan penduduk ini membuat tekanan kepada para petani untuk menjual lahan garapan mereka ke para pengembang perumahan yang sangat haus lahan. Para pengembang inilah yang dengan cepat melakukan konversi lahan, dari lahan pertanian persawahan menjadi lahan industri jasa dan manufaktur, perumahan *real-estate* dan pusat-pusat bisnis. Desa-desa pun satu demi satu menghilang, berubah menjadi perkotaan. Terjadi perubahan sosial dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan.

Bogor berada di persimpangan jalan. Secara alamiah, Bogor tumbuh sebagai bagian dari kota megalopolitan Jabodetabek seperti yang sedang terjadi sekarang. Tapi ada alternatif lain. Bogor bisa juga direncanakan menjadi ibukota provinsi baru hasil pemekaran, yaitu provinsi Bogor Raya, yang meliputi wilayah eks-Keresidenan Bogor, yaitu kabupaten/kota Bogor, Sukabumi dan Cianjur, ditambah sebagian kecil wilayah Karawang, Bekasi dan Tangerang. Tidak seperti wilayah pedesaan yang bisa dibiarkan berkembang (atau mati) secara alamiah, wilayah perkotaan harus dikembangkan dengan pengkajian dan perencanaan yang matang dan seksama, mengikuti kaidah-kaidah baku, supaya tidak jadi kumuh dan kacau-balau. Oleh karena itu, kota dan kabupaten Bogor mestilah jelas visinya: apakah menjadi bagian dari kota megalopolitan Jabodetabek, atau menjadi ibukota provinsi Bogor Raya? Pertanyaan yang harus dijawab oleh kepala-kepala daerah yang baru terpilih di Jabodetabek.